



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



RANCANGAN

RENJA AKHIR 2026

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA PEKALONGAN



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum.....	2
1.3.	Maksud dan Tujuan	4
1.4.	Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH Triwulan IV 2024	8
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	8
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3.	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	19
2.4.	Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	24
2.5.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP.....	38
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	38
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	38
3.3.	Program dan Kegiatan	39
3.4.	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	52
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	54
BAB V	PENUTUP	62
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Pemerintah Kota Pekalongan Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 S/D 2026	10
Tabel 2. 2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024	16
Tabel 2. 3	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024	17
Tabel 2. 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kota Pekalongan.....	19
Tabel 2. 5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 DLH Kota Pekalongan	26
Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026.....	39
Tabel 3. 2	Rumusan Rencana Program Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 DLH Kota Pekalongan	41
Tabel 3. 3	Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026	52



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024, serta mempertimbangkan visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dengan tetap memperhatikan hasil kinerja yang dicapai sebelumnya, permasalahan yang ada dan isu strategis yang dihadapi. Program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan KepMendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Renja OPD ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kota Pekalongan Tahun 2025. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyeluruh, efektif dan efisien, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, factual dan realistis. Secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 tidak boleh lepas dari beberapa hal sebagaimana berikut:

1. Apa yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya baik kelebihan maupun kekurangannya dalam pencapaian target - target yang telah ditetapkan. Semua pihak yang terkait dalam pencapaian target dimaksud harus mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan dibidang lingkungan dapat lebih optimal;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. Pembangunan dilaksanakan untuk saling memperbaiki dan melengkapi berbagai kekurangan serta kelemahan



pelaksanaan pembangunan daerah dibidang lingkungan. Pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya yang masih belum mampu diselesaikan atau bahkan yang belum terlaksana pada tahun 2025 harus menjadi prioritas penanganan pada tahun 2026;

3. Memprediksi kebutuhan-kebutuhan pembangunan pada kurun waktu satu tahun berikutnya sekaligus mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang diperkirakan muncul dan berkembang sehingga dapat dijamin konsistensi penerapan prinsip-prinsip pembangunan partisipatif dan berkelanjutan yang telah dikembangkan dengan baik;
4. Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kelima dari periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2021 – 2026, oleh karena itu dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2026 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2021 – 2026 dan sebagai tindak lanjut dari RKPD tahun 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026. Kedudukan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi:

1. Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);



12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Esensi dari Rencana Kerja ini bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2026 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan.

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 adalah:

1. Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas pembangunan tahun 2026 dan mensinkronkan dengan program dan kegiatan dari provinsi dan pusat.
2. Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup ini adalah dipakai sebagai pedoman atau acuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan dalam melakukan dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik;
2. Menurunkan tingkat pencemaran air;
3. Meningkatkan kualitas lahan; dan
4. Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan perkotaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang



Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup, proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup, keterkaitan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup, dengan Renja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Renja Dinas Lingkungan Hidup serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup 2025 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026.

Bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2026, mengacu pada APBD tahun berjalan pada waktu penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun-tahun sebelumnya.

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, serta ketentuan peraturan perundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Berisikan uraian mengenai:



1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Walikota Pekalongan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDG's (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kota Pekalongan.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan



Hidup yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup

Berisikan Program, kegiatan dan rencana pendanaan Dinas Lingkungan Hidup.

Bab V : Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa :

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan
- 5.3 Rencana tindak lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN IV DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Triwulan IV Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian Renja tahun 2024 dan capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup. Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2024 secara umum Dinas Lingkungan Hidup telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi.

Tujuan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Dinas Lingkungan Hidup disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan Kota Pekalongan. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam capaian kinerja strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024 memuat 9 (sembilan) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 31.940.108.000,-. Setelah melalui beberapa tahapan proses perencanaan dan pembahasan oleh TAPD, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kota



Pekalongan tahun 2024 anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 32.591.270.000,- dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan sama dengan penetapan APBD. Sebagai dasar penilaian kinerja capaian keuangan, keluaran dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi “Sangat Tinggi” yaitu capaian berkisar antara 91-100%, “Tinggi” yaitu capaian berkisar antara 75-90%, “Sedang” yaitu capaian berkisar antara 65-75%, “Rendah” yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan “Sangat Rendah” yaitu capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan APBD-P DLH Kota Pekalongan tahun 2024, terdapat 39 sub kegiatan dengan status capaian “Sangat Tinggi” dan 1 sub kegiatan dengan status capaian “Tinggi”, tidak ada sub kegiatan dengan status capaian “Sedang”, 0 sub kegiatan dengan status capaian “Rendah” dan 0 sub kegiatan dengan status capaian “Sangat Rendah”.

Capaian kinerja keluaran (*output*) sebagian besar kegiatan di DLH Kota Pekalongan status capaiannya kategori “sangat baik” yaitu 38 sub kegiatan dan kategori “sangat rendah” 1 (satu) kegiatan. Sedangkan capaian kinerja program (hasil/outcome) yang merujuk pada Bab VIII - RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026, dari 10 indikator kinerja program terdapat 7 indikator yang telah memenuhi target kinerja dan 2 indikator yang belum memenuhi target kinerja. Indikator kinerja program yang belum memenuhi target adalah Indikator Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Faktor penyebab belum tercapainya target pada Indikator Program Kehati adalah penambahan luasan ruang terbuka hijau belum sesuai yang ditargetkan, sementara faktor penyebab belum tercapainya target pada Indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah belum tercapainya jumlah Perusahaan yang harus mengajukan perizinan lingkungan

Hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD-P Tahun 2023 dan Rencana Capaian Tahun 2024 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel. 2.1.



Tabel 2. 1
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENJA S.D 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN

No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2023)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2024	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Lingkungan Hidup										
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	100	100	120	0	0	0	0	
2	Persentase Limbah Yang Diolah	Persen	49,01	40,95	92,65	45,02	27,06	108,23	240,40	Tercapai
	- Jumlah monitoring terhadap kegiatan/usaha pemanfaat air tanah yang dilaksanakan	titik	50	50	51	0	0			
	- Jumlah pengambilan sampel air sungai yang dilakukan	kali	0	30	30	0	0			
	- Jumlah sampah yang diambil dari sungai	M3	0	3.000	3.000	0	0			
	- jumlah kampung iklim yang dibentuk	lokasi	0	1	1	0	0			
	- Jumlah parameter yang diakreditasi	parameter	0	20	20	0	0			
	- Jumlah sampel yang diuji	sampel	0	170	278	0	0			
	- Jumlah Uji Profesiensi/uji banding	Hasil uji	0	1	1	1	1			
	- jumlah DIKPLHD yang disusun	dokumen	0	1	1	0	0			
	- jumlah dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun	dokumen	0	1	1	0	0			
	- Jumlah limbah cair yang dikelola	M3	0	240.000	240.000	0	0			



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2023)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2024	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024			
3	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	2,949	2,919	2,900	2,929	2,37	2,37	80,40	Tidak Tercapai
	- Jumlah Lokasi pemeliharaan pohon di sempadan jalan	lokasi	0	4	4	4	4			
	- Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala makam	lokasi	0	2	2	2	2			
	- Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala taman kota	lokasi	0	1	1	1	1			
	- Jumlah pengadaan konstruksi taman kota (SIDa)	lokasi	0	2	2	0	0			
	- jumlah TAHURA yang dipelihara	lokasi	0	6	6	6	6			
4	Persentase Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 Yang Diberikan	Persen	100	44,44	44,44	13,33	13,33	44,44	44,44	Tidak Tercapai
	- Jumlah verifikasi lapangan ke usaha/kegiatan yang mengajukan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 maupun perpanjangan Izinnya	Usaha/kegiatan	0	14	14	14	14			
5	Persentase Usaha/Kegiatan yang mendapatkan rekomendasi Persetujuan Teknis Lingkungan dan Persetujuan Teknis PPLH	Persen	100	16,67	16,67	16,67	7,67	36,84	36,84	Tidak Tercapai
	- Jumlah monitoring/pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan kepada perusahaan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan	perusahaan	0	10	10	10	10			
	- Jumlah perusahaan yang memiliki Izin Lingkungan yang diawasi	Perusahaan	0	65	65	65	65			
	- Jumlah pengawasan terpadu dengan pihak terkait dalam rangka penerapan sanksi upaya dan rencana PPLH	kali	0	5	3	5	3			
6	Persentase Masyarakat/Komunitas Peduli LH Yang Mendapatkan Edukasi Lingkungan Hidup	Persen	50	50	50	50	100	100	200	Tercapai
	- Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	komunitas	0	5	5	5	5			
	- Jumlah kelompok lembaga kemasyarakatan (PKK RT/ RW/Kelurahan/Kecamatan) yang mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan lingkungan hidup	kelompok	0	2	2	2	2			



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2023)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2024	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024			
	- Jumlah pemberdayaan komunitas peduli lingkungan hidup di Kota	komunitas	0	5	5	5	5			
	- Jumlah Saka Kalpataru (Pramuka) yang dibina	orang	0	80	80	80	80			
	- Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan	Event	0	1	2	1	2			
	- Jumlah lomba-lomba dalam rangka peringatan hari-hari besar lingkungan hidup yang diselenggarakan	lomba	0	4	4	4	4			
7	Persentase Perolehan Penghargaan Bidang LH	Persen	75	75	75	75	100	100	133,33	Tercapai
	- Jumlah penilaian Adiwiyata Tingkat Kota yang diselenggarakan	Event	0	1	1	1	1			
	- Jumlah penilaian peringkat kinerja Perusahaan (proper) Daerah yang diselenggarakan	Event	0	1	1	1	1			
	- Jumlah penilaian sekolah adiwiyata yang diusulkan ke Tingkat Provinsi dan Nasional	Event	0	2	2	2	2			
8	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup Dari Masyarakat Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	Jumlah koordinasi penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan	kali	0	18	25	18	25			
9	Persentase pengelolaan sampah	persen	0,31	0,28	0,31	0,29	0,31	0,31	105,01	Tercapai
	- Jumlah bulan operasional pengelolaan kebersihan dan pelayanan sampah	bulan	0	12	12	12	12			
	- Jumlah ruas jalan yang dibersihkan/disapu	ruas jalan	0	55	55	55	55			
	- Jumlah TPS3R yang difasilitasi (SIDa)	TPS3R	0	21	21	21	21			
	- Jumlah bulan fasilitasi operasional bank sampah induk	bulan	0	12	12	12	12			
	- Jumlah bulan operasional pengangkutan sampah	bulan	0	12	12	12	12			
	- Jumlah gerobak sampah yang dibeli	unit	0	7	7	7	7			
	- Jumlah kendaraan roda tiga yang dibeli	unit	0	2	2	2	2			
	- Jumlah rumah botol plastik yang dibeli	unit	0	6	6	6	6			



No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2023)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2024	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024			
	- Jumlah tempat sampah yang dibeli	buah	0	70	82	70	82			
	- Jumlah bahan habis pakai yang dibeli	jenis	0	12	12	1	1			
	- Jumlah dumptruk yang dibeli	unit	0	1	1	1	1			
	- Jumlah gerobak sampah yang diadakan	unit	0	78	77	78	77			
	- Jumlah jembatan timbang yang ditera	unit	0	1	1	1	1			
	- Jumlah kendaraan roda 3 yang dipelihara	unit	0	18	18	18	18			
	- Jumlah mesin pemilah sampah yang diadakan	unit	0	2	2	2	2			
	- Jumlah perlengkapan pakaian kerja yang diadakan	jenis	0	4	4	4	4			
	- Jumlah TPS3R yang dipelihara	unit	0	3	6	3	6			
Urusan Rutin										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100	100	100,01	100,01	100,01	Tercapai
	- Jumlah dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun	dokumen	0	2	2	2	2			
	- Jumlah dokumen RKA dan perubahan RKA yang disusun	dokumen	0	2	2	2	2			
	- Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah	bulan	0	12	12	12	12			
	- Jumlah dokumen SAKIP yang disusun (penetapan dan perubahan)	dokumen	0	2	2	2	2			
	- Jumlah dokumen evaluasi renja yang disusun	dokumen	0	4	4	4	4			
	- Jumlah dokumen SPIP (1 dokumen Rencana Tindak Pengawasan (RTP), 4 laporan pemantauan RTP) yang disusun	dokumen	0	5	5	5	5			
	- Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	0	14	14	14	14			
	- Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan	bulan	0	12	12	12	12			
	- Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang disusun	dokumen	0	1	1	1	1			



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2023)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2024	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024			
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	103,06	100	102,76	102,76	102,76	Tercapai
	- Jumlah keikutsertaan dalam karnaval batik dan hari jadi	kali	0	1	1	1	1			
	- Jumlah pakaian kerja lapangan/rompi yang diadakan	buah	0	441	441	114	114			
	- Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket	0	12	12	4	4			
	- Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos	paket	0	12	12	4	4			
	- Jumlah paket peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan	paket	0	72	107	4	4			
	- Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga	paket	0	12	12	4	4			
	- Jumlah paket bahan logistic kantor	paket	0	11	11	4	4			
	- Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	paket	0	12	12	2	2			
	- Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	bulan	0	12	12	12	12			
	- Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah	Orang/kali		80	112	95	95			
	- Jumlah IPAL Laboratorium yang dibangun	unit		0	0	0	0			
	- Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan		12	12	12	12			
	- Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan		12	12	12	12			
	- Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	bulan		12	12	12	12			
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai



No	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (2023)	Realisasi 2023	Tahun 2024		Realisasi Capaian RPJMD sd tahun 2024	Persentase Capaian Terhadap Target RPJMD	Status Capaian
						Target 2024	Realisasi 2024			
	- Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	bulan	0	12	12	12	12			
	- Jumlah bulan pemeliharaan alat besar	bulan	0	12	12	12	12			
	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala	unit	0	1	1	1	1			
	- Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	0	12	12	12	12			



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada DLH Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja utama Rencana Strategis DLD Kota Pekalongan. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bahwa analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam Norma Standar Pelayanan Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Kinerja pelayanan DLH Kota Pekalongan dapat dilihat pada capaian pelaksanaan tugas pokoknya yaitu memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang tata lingkungan dan penataan hukum lingkungan, bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan dan pengelolaan RTH, serta bidang kebersihan dan pengelolaan sampah. Pada tahun 2024 sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya dengan 1 (satu) indikator;
2. Meningkatnya ruang terbuka hijau dengan 1 (satu) indikator;
3. Optimalnya cakupan layanan persampahan dengan 1 (satu) indikator;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan 1 (satu) indikator; dan
5. Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup dengan 1 (satu) indikator.

Tabel 2. 2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	$= \frac{\sum \text{Parameter yang tidak sesuai baku mutu pada 5 sungai}}{\sum \text{Parameter air pada 5 sungai (7 x 5)}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kenaikan luasan RTH	$= \frac{\text{Luas RTH tahun N} - \text{Luas RTH tahun N-1}}{\text{Luas RTH tahun N-1}} \times 100 \%$
3	Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	$= \frac{\sum \text{sampah terkelola tahun N} - \sum \text{sampah terkelola tahun N-1}}{\sum \text{sampah terkelola tahun N-1}} \times 100 \%$
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD Tahun N



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
5	Meningkatnya penataan dan ketaatan hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan	$\frac{\sum \text{usaha dan/atau kegiatan yang melaporkan pelaksanaan AMDAL/UKL/UPL}}{\sum \text{usaha dan/atau kegiatan yang memiliki AMDAL/UKL/UPL}} \times 100 \%$

Penilaian capaian kinerja utama DLH Kota Pekalongan tahun 2024 difokuskan pada 9 (sembilan) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
9. Program Pengelolaan Persampahan.

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran Stretegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya usaha yang terolah limbahnya	Persentase tingkat pencemaran air	60,00%	54,29%	78.95
2	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase kenaikan luasan RTH	0,34%	0,11%	45.48
3	Optimalnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	70,68%	92,55%	130,94
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	86.05	85,45	99,30
5	Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup	Tertib hukum lingkungan	43,00%	43,51%	101,18

Hasil analisis berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran tabel diatas adalah sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target ditunjukkan pada indikator optimalnya cakupan layanan persampahan dengan capaian kinerja 130,94%



dan meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup dengan capaian kinerja 101,18% atau dikategorikan **sangat tinggi**;

- b. Capaian kinerja yang tidak mencapai target atau dibawah 100% ada pada indikator meningkatnya usaha yang terolah limbahnya dengan capaian kinerja 78,95% dengan kategori **tinggi**, meningkatnya ruang terbuka hijau (RTH) dengan capaian kinerja 45,48% atau masuk kategori **sangat rendah**, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan capaian kinerja 99,30% atau masuk dalam katagori **tinggi**.

Selanjutnya hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:



Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan DLH Kota Pekalongan

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n- 1)	Tahun 2026 (thn n)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase tingkat pencemaran air			62,86	42,86	42,86	42,86	28,57	54,29	42,86
2	Persentase kenaikan luasan RTH			0,344	0,343	0,341	0,340	1,31	0,11	0,340
3	Persentase peningkatan pengelolaan sampah			70,12	71,12	72,12	73,12	95,20	92,55	73,12
4	Nilai SAKIP OPD			87	86,05	86,05	86,30	86,05	85,45	86,30
5	Tertib hukum lingkungan			34,42	43,00	51,90	60,1	43,04	43,51	60,1

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

A. Permasalahan

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Tidak semua industri melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air limbah yang dihasilkan secara rutin.
2. Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang tidak mempunyai IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).
3. Sebagian besar industri kecil dan menengah membuang langsung air limbahnya ke saluran air atau sumber air.
4. Belum ditentukannya kelas air sungai.
5. Belum memiliki peralatan laboratorium yang memadai untuk uji kualitas udara.
6. Belum dilakukannya penetapan baku mutu kualitas udara emisi dan ambien.
7. Belum adanya pos pengaduan masyarakat yang mengakomodasi akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Selama ini pengaduan langsung ditujukan ke LH.
8. Masih minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
9. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
10. Belum optimalnya dukungan SDM.

B. Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup telah menyusun



program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD tersebut kinerja DLH Kota Pekalongan mendukung pencapaian Misi ke 4 yaitu **“Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan”** dengan tujuan “meningkatkan kualitas lingkungan hidup”.

C. Tantangan dan Peluang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya DLH kota Pekalongan menghadapi tantangan sebagai berikut:

1. Letak geografis dan topografi yang berada di daerah pesisir.
2. Ketersediaan sumber utama air menurun dengan sangat cepat, diakibatkan kurangnya pencarian sumber air tanah yang baru untuk Kota Pekalongan.
3. Meningkatnya polusi terhadap air permukaan dan air tanah.
4. Kualitas udara terus menurun.
5. Produksi limbah padat/sampah naik secara signifikan.
6. Kurangnya SDM yang berkompeten sesuai bidang dan tanggungjawab pekerjaan, serta personil teknis yang dapat menganalisa dan membuat perencanaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
7. Masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan.
8. Rendahnya kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peluang yang dapat disiasati dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan antara lain:

1. Memperbaiki ketersediaan sistem pembuangan limbah.
2. Mengelola sumber daya air.
3. Mengurangi kepadatan lalu-lintas dan emisi kendaraan.
4. Libatkan sektor swasta dalam pengurangan efek gas rumah kaca.
5. Libatkan publik dan sektor swasta dalam pengelolaan limbah padat/sampah.
6. Membersihkan polusi dari perusahaan-perusahaan yang ada.
7. Mengurangi kadar polusi perusahaan-perusahaan.
8. Mengoptimalkan peran pihak terkait atau stakeholder.
9. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan.
10. Meningkatkan kapasitas SDM.



D. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan dan pengidentifikasian isu-isu yang tepat, cermat yang bersifat strategis sangat penting sekali karena merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah:

1. Pengendalian Pencemaran Air

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah dengan wilayah pantai, dan merupakan pula kota perdagangan dan industri yang didominasi oleh industri produk tekstil dan batik yang cukup dikenal baik dalam lingkup nasional maupun global, disamping ada pula industri dibidang perikanan dan industri lainnya yang berpotensi menimbulkan pencemaran baik air, tanah maupun udara. Berkaitan dengan permasalahan limbah industri berbagai upaya perbaikan telah dilakukan baik melalui sosialisasi masyarakat terutama kalangan industri dan UKM, fasilitasi pembangunan IPAL skala kecil ataupun IPAL bersama, namun belum dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, mengingat sumber pencemar tidak hanya berasal dari wilayah Kota Pekalongan saja, mengingat Kota Pekalongan merupakan wilayah hilir maka sumber pencemarannya pun berasal dari daerah di luar Kota Pekalongan, yang juga banyak menghasilkan limbah industri.

2. Pengendalian Pencemaran Udara

Kota Pekalongan merupakan daerah yang berada disisi sebelah utara Pulau Jawa yang dilalui oleh jalur transportasi utama di Pulau Jawa. Jumlah kendaraan berat yang melintasi Kota Pekalongan sangat banyak yang berdampak pada tingginya jumlah emisi gas buang di Kota Pekalongan yang menyebabkan pencemaran udara. Selain berasal dari sumber emisi bergerak, pencemaran udara berasal dari emisi tidak bergerak, yaitu industri yang menggunakan bahan bakar batu bara, bensin maupun solar dan sejenisnya yang menghasilkan gas buang melalui cerobong yang menyebabkan pencemaran udara sehingga kualitas udara menurun. Permasalahan pencemaran udara juga muncul, sehingga kualitas udarapun semakin menurun akibat semakin banyak dihasilkannya emisi gas buang baik dari transportasi ataupun asap industri.



3. Pengelolaan Sampah/Limbah Padat

Isu persampahan merupakan hal yang perlu mendapat perhatian khusus, karena pada dasarnya setiap hari semua orang menghasilkan sampah, sehingga volume sampah semakin lama akan semakin bertambah. Dalam jangka panjang apabila tidak dilakukan pengelolaan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang diharuskan akan menjadi permasalahan lingkungan yang sangat mengkhawatirkan, apabila untuk kawasan perkotaan dengan luas lahan yang relatif terbatas, sebagaimana telah terjadi di berbagai daerah. Untuk itu isu/permasalahan persampahan di masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian dan penerapan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan sehingga secara bertahap volume sampah dapat dikurangi dan tidak terus meningkat.

TPA Degayu yang saat ini menjadi satu satunya tempat pemrosesan akhir sampah di Kota Pekalongan masih menggunakan open dumping, disamping itu tumpukan sampah di TPA Degayu volumenya semakin banyak sehingga sudah mendekati kapasitas maksimal, sedangkan untuk penambahan lahan TPA sudah tidak memungkinkan karena daerah tersebut peruntukannya bukan untuk TPA.

4. Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Pemanasan Global (Global Warming)

Isu pemanasan global yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dan ekosistem bumi akibat efek gas rumah kaca, rusaknya lapisan ozon akibat banyaknya emisi gas buang yang dihasilkan kegiatan manusia dampaknya akan sangat mengerikan, secara makro yang dapat memacu terjadinya perubahan iklim, mencairnya es di kutub utara dan selatan, serta kerusakan bumi lainnya. Untuk itu isu pemanasan global ini harus menjadi perhatian semua kalangan serta perlu dilakukannya tindakan-tindakan pencegahan, pemulihan kondisi lingkungan guna meminimalisir terjadinya dampak pemanasan global tersebut.

5. Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau dan Perubahan Penggunaan Lahan.

Ruang terbuka hijau memiliki peranan yang cukup penting untuk mengurangi pencemaran udara di Kota Pekalongan, sekaligus meningkatkan kesejukan dan kerapian kota. Sebagaimana kita ketahui, keberadaan ruang terbuka hijau kota telah menjadi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu besar ruang terbuka hijau tersebut minimal 30% dari luas kota. Sementara ini luas ruang terbuka hijau di Kota Pekalongan adalah sebesar 110.062 ha. Perbandingan luas ruang terbuka hijau dibanding luas wilayah Kota Pekalongan adalah 110.062 ha : 3.742 ha (luas wilayah Kota Pekalongan dikurangi sawah, tambak dan badan air) atau sebesar 2,944 %. Persentase tersebut masih jauh dari luas RTH yang dipersyaratkan dalam UU No. 26 Tahun 2007. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan harus berupaya untuk menambah luasan



RTH yang ada. Terutamanya penambahan ruang-ruang hijau untuk publik yang dirasa masih kurang seperti taman kota, taman lingkungan baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW dan sebagainya.

Perubahan penggunaan lahan juga berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena berubahnya fungsi lahan, misalnya dari semula lahan pertanian menjadi lahan perumahan atau lahan industri, sehingga mengakibatkan kurangnya daerah resapan air yang dampaknya ketika hujan terjadi banjir.

6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan.

Kita ketahui bersama bahwa saat ini, tingkat kesadaran masyarakat tentang kepedulian terhadap lingkungan masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, sebagai contoh membuang sampah/limbah sembarangan, melakukan penebangan tanaman/hutan tanpa berusaha melakukan penanaman kembali, kurang perhatian terhadap gerakan penghijauan, kurang menyadari bahwa bumi ini nantinya perlu dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan generasi selanjutnya. Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut salah satu sebabnya antara lain belum tersosialisasikannya secara optimal peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup serta masih lemahnya penegakan peraturan tentang lingkungan hidup.

7. Adaptasi dan Mitigasi Rob.

Rob merupakan permasalahan yang sangat sulit diatasi, disamping disebabkan oleh penurunan permukaan tanah juga disebabkan oleh meningkatnya permukaan air laut yang disebabkan oleh Global Warming (*Pemanasan Global*).

Penurunan permukaan tanah salah satunya disebabkan oleh banyaknya pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan hidup dan untuk industri yang tidak terkendali. *Global Warming* (Pemanasan Global) merupakan fenomena alam yang terjadi secara global di berbagai belahan dunia. Hal ini disebabkan karena tingginya Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari pembakaran fosil.

Kawasan yang terkena dampak rob saat ini semakin meluas, hal ini menyebabkan kerentanan masyarakat terhadap penyakit semakin tinggi. Semua kelurahan yang berada di daerah pesisir Kota Pekalongan diantaranya Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Degayu, Panjang Wetan, Pasirkratonkramat, Krapyak, Klego dan Pabean terkena dampak rob.

8. Kerusakan biomasa

Tingginya jumlah pupuk kimia yang digunakan untuk pertanian saat ini menjadi kendala di semua daerah termasuk Kota Pekalongan. Pupuk



kimia yang digunakan secara terus menerus akan menghasilkan panen yang maksimal akan tetapi lama kelamaan akan menyebabkan ketergantungan terhadap pupuk kimia yang menyebabkan tanah tersebut akan mengalami kerusakan. Selain dari pupuk kimia, kerusakan biomasa juga diakibatkan oleh tingginya pencemaran air industri sehingga biomasa menjadi kurang berfungsi dengan maksimal.

9. Konservasi Sumber Daya Air (SDA)

Kota Pekalongan merupakan kota jasa yang memiliki banyak sekali industri kecil yang berpotensi mencemari lingkungan. Dampaknya adalah berkurangnya ketersediaan air bersih dari sumur dangkal di wilayah tersebut. Didaerah pantai sumur dangkal sudah tercemar karena adanya intrusi air laut sehingga rasa air sumur menjadi asin. Salah satu upaya untuk mendapatkan air bersih tersebut adalah dengan membuat sumur dalam / sumur artesis atau dengan mengambil air dari Kabupaten Batang maupun Kabupaten Pekalongan. Perlu adanya konservasi sumber daya air agar jumlah air bersih di Kota Pekalongan terjaga.

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan.

Kota Pekalongan memiliki daerah yang wilayahnya secara ekonomis sangat menguntungkan, tetapi dilihat dari dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat merugikan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya sarana dan prasarana pendukung agar dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat tertangani dengan baik. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan diantaranya adalah sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air, udara, persampahan, limbah B3, rob dan lain lain.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Renja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Disamping itu dokumen Renja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan disusunnya Rancangan Awal RKPD Kota Pekalongan tahun 2026, telah dirumuskan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2026. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dengan membandingkan rumusan rancangan awal RKPD dengan ketersediaan



anggaran serta kebutuhan OPD, terdapat perbedaan yang menyebabkan perubahan perumusan kebutuhan tersebut. Perubahan rumusan kebutuhan dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Perubahan tersebut antara lain anggaran pagu kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:



Tabel 2. 5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 DLH Kota Pekalongan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	10.303.671.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Pekalongan	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	14.888.556.000	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	23.051.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	27.470.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.480.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	1.640.000	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 laporan	18.651.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	22.350.000	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	10.280.620.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	10.170.149.000	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	101 orang/bulan	10.172.970.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pekalongan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	101 orang/bulan	10.064.449.000	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	106.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	104,180,000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.650,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.520,000	



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	28.531.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	12.330.000	
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	28.531.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	12.330.000	
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	250.975.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	373.123.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.700.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.026.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	57.900.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 Paket	43.678.000	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	8.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	4 Paket	730.000	
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	82.300.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	141.700.000	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	24.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pekalongan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	35.000.000	
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	2.580.000	
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	70.075.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	140.409.000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	554.735.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	557.271.000	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 Laporan	1.760.000	



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	263.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Laporan	264.628.000	
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	289.335.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	290.883.000	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.192.597.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.748.213.000	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	162.982.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pekalongan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	145.110.000	
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Pekalongan	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	57 unit	1.899.315.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Pekalongan	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	57 Unit	3.307.093.000	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	105.300.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	277.760.000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	25.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pekalongan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	18.250.000	
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Pekalongan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	20 persen	0	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Pekalongan	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	20 persen	0	
a	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	0 dokumen	0	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	1 dokumen	0	



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
b	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang disusun	0 dokumen	0	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Pekalongan	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang disusun	2 dokumen	0	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Pekalongan	Persentase limbah yang diolah	49,01 persen	3.491.106.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Pekalongan	Persentase limbah yang diolah	49,01 persen	1.136.972.000	
a	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	53,57 persen	848.604.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	53,57 persen	736.064.000	
22	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 Dokumen	570.018.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1 Dokumen	516.134.000	
23	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Pekalongan	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Pekalongan	jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	18.250.000	
24	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	200 Dokumen	253.586.000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	200 Dokumen	201.680.000	
b	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76.47 persen	2.642.502.000	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76.47 persen	400.908.000	



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	3 Laporan	66.000.000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	3 Laporan	48.180.000	
27	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	73 Titik	2.576.502.000	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	73 Titik	352.728.000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Pekalongan	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,949 persen	4.191.994.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Pekalongan	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,949 persen	2.694.592.000	
a	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Luas RTH Publik	110,355 Ha	4.191.994.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Luas RTH Publik	110.355 Ha	2.694.592.000	
28	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Pekalongan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	109 Ha	3.929.494.000	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kota Pekalongan	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	109 Ha	1.933.632.000	
29	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kota Pekalongan	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Unit	262.500.000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kota Pekalongan	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	34 Unit	760.960.000	
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Pekalongan	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	15,56 persen	2.273.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Pekalongan	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	15,56 persen	1.640.000	
a	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Pekalongan	Jumlah usaha / kegiatan yang diverifikasi untuk mengelola limbah B3 sesuai ketentuan perundangan	7 usaha/kegiatan	2.273.000	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Pekalongan	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	7 usaha/kegiatan	1.640.000	



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	2.273.000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Pekalongan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	1.640.000	
						Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kota Pekalongan	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	6 Usaha	1.640.000	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Pekalongan	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	23.368.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Pekalongan	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	29.590.000	
a	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin Lingkungan dan izin PPLH diterbitkan	100 persen	23.368.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	persentase ketercapaian kegiatan pembinaan dan pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan	100 persen	29.590.000	
31	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Pekalongan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	23.368.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Pekalongan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	11.230.000	



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Kota Pekalongan	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	0	0	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Kota Pekalongan	Jumlah Badan Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi	10 Badan Usaha	18.360.000	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Pekalongan	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	322.836.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Pekalongan	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50,00 persen	352.500.000	
a	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	322.836.000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	100 persen	352.500.000	
34	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat	Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/Lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	0	0	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Pekalongan	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/Lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	9 Lembaga	138.585.000	



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	90.000.000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	52.500.000	
36	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	700 Orang	232.836.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	700 orang	161.415.000	
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Pekalongan	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	100 persen	86.386.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Pekalongan	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	100 persen	44.350.000	
a	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	3 penghargaan	86.386.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	3 penghargaan	44.350.000	
37	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	86.386.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	44.350.000	



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Pekalongan	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	9.310.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Pekalongan	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	10.630.000	
a	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6 kasus	9.310.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6 kasus	10.630.000	
38	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	18 Pengaduan	9.310.000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	18 pengaduan	9.310.000	
39	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Pekalongan	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada pengganggu jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	1 perkara	0	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Kota Pekalongan	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada pengganggu jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	1 sanksi	1.320.000	
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Pekalongan	Persentase pengelolaan sampah	0,31 persen	14.372.095.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Pekalongan	Persentase pengelolaan sampah	0,31 persen	14.685.406.000	
a	Pengelolaan Sampah	Kota Pekalongan	Persentase pengurangan sampah	18,19 persen	14.372.095.000	Pengelolaan Sampah	Kota Pekalongan	Persentase pengurangan sampah	18,19 persen	14.685.406.000	
40	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Kota Pekalongan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten.Kota atau TPA/TPST Regional	56.324.807 Ton	6.774.361.000	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten.Kota atau TPA/TPST Regional	56.324.807 Ton	8.574.159.000	



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	35 Kelompok	427.734.000	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Pekalongan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	35 Kelompok	497.970.000	
41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	7.170.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kota Pekalongan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	5.613.277.000	
JUMLAH					32.829.877.000	JUMLAH					33.844.236.000

Pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN semula Rp 10.172.970.000 berkurang menjadi Rp 10.064.449.000 dikarenakan semula ASN sebanyak 101 orang, pada tahun 2026 pensiun 3 orang sehingga menjadi 98 orang. Pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah semula 18.651.000 menjadi Rp 22.350.000 disesuaikan dengan kebutuhan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah selama 1 tahun. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor semula Rp 5.700.000 menjadi Rp 9.026.000 karena ada penambahan alat listrik untuk TPST. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 82.300.000,- menjadi Rp 141.700.000,- karena kenaikan harga dan bertambahnya karyawan/karyawati DLH. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan semula Rp 24.500.000,- menjadi Rp 35.000.000,- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



semula Rp 70.075.000,- menjadi Rp 140.409.000,- karena banyaknya undangan rapat keluar daerah. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar semula Rp 1.899.315.000 menjadi Rp 3.307.093.000,- karena BBM untuk operasional pengelolaan sampah. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya semula Rp 105.300.000,- menjadi Rp 277.760.000,- untuk pemeliharaan halaman DLH yang sering banjir. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya semula Rp 262.500.000 menjadi Rp 760.960.000,- untuk pemeliharaan taman dan hutan kota. Untuk Sub Kegiatan lainnya mengalami penurunan karena ada rasionalisasi.



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk tingkat nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (stakeholders). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program, dan diyakini bahwa besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di mana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniwan, pemilik usaha, kelompok profesional, organisasi non-pemerintah, dan lain-lain.

Demi mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, yakni Terwujudnya Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Religius. Pemerintah Kota Pekalongan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan (RPJMD) Tahun 2021-2026. Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kota Pekalongan dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang Kelurahan, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD yang menghasilkan rancangan akhir RKPD untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan. Didalam Musrenbang RKPD Tahun 2023 terdapat beberapa usulan dari kelompok masyarakat yang terkait dengan tupoksi DLH Kota Pekalongan, usulan tersebut diantaranya sebagai berikut



BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagai bagian dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan nasional/program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, khususnya dengan menjabarkan visi pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita sebagai landasan strategis untuk menjamin sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2026 berpedoman pada arah kebijakan Pembangunan nasional, prioritas Pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2026 Kementerian LHK menekankan tindak lanjut dan arah pembangunan LHK sekaligus mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, serta (c) Pembangunan Rendah Karbon.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan pada isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DLH Kota Pekalongan serta identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai sesuai tujuan organisasi. Adapun tujuan dan sasaran DLH Kota Pekalongan, telah dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
2. Mengoptimalkan pengelolaan sampah;
3. Meningkatkan kualitas layanan publik.

b. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara;
2. Meningkatnya luasan RTH Publik dan tutupan lahan;
3. Optimalnya pengurangan sampah dari hulu;

4. Meningkatnya tertib hukum lingkungan hidup;
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran DLH Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2026 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing seksi selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas air	59,47%
		Meningkatnya luasan RTH Publik dan tutupan lahan	Indeks kualitas lahan (IKK)	37,66 %
		Meningkatnya tertib hukum lingkungan	Tertib hukum lingkungan hidup	48 %
2	Mengoptimalkan pengelolaan sampah	Optimalnya penguranagn sampah dari hulu	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (IUP)	46,75 ton/hari
3	Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	86,57

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting



terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Rencana kerja tahun 2026 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasarannya. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2025. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 9 Program, 15 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan jumlah pagu Rp. 40.635.550.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kota Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2026 tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:



Tabel 3. 2
Rumusan Rencana Program Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 DLH Kota Pekalongan

Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				40.635.550.000				35.848.237.000
2.11	LINGKUNGAN HIDUP				40.635.550.000				35.848.237.000
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Kota Pekalongan	100%	14.321.870.000	APBD		100%	13.330.509.000
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Pekalongan	100%	27.470.000	APBD		100%	23.051.000
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	3 dokumen	3.480.000	APBD		2 dokumen	2.750.000
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pekalongan	2 dokumen	1.640.000	APBD		2 dokumen	1.650.000



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pekalongan	15 laporan	22.350.000	APBD		15 laporan	18.651.000
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 persen	9.603.463.000	APBD		100 persen	10.280.620.000
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Pekalongan	14 bulan	9.497.763.000	APBD		14 bulan	10.172.970.000
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan / verifikasi keuangan SKPD	Kota Pekalongan	12 dokumen	104.180.000	APBD		12 dokumen	106.000.000
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Pekalongan	1 dokumen	1.520.000	APBD		1 dokumen	1.650.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kota Pekalongan	100 persen	12.330.000	APBD		100 persen	28.531.000
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kota Pekalongan	2 paket	12.330.000	APBD		2 paket	28.531.000
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Kota Pekalongan	100 Persen	373.123.000	APBD		100 Persen	250.975.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket penyediaan komponen instalasi Listrik	Kota Pekalongan	4 Paket	9.026.000	APBD		4 Paket	5.700.000
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	43.678.000	APBD		4 paket	57.900.000
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	730.000	APBD		4 paket	8.000.000
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistic kantor yang disediakan	Kota Pekalongan	4 paket	141.700.000	APBD		4 paket	82.300.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Pekalongan	2 paket	35.000.000	APBD		2 paket	24.500.000
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kota Pekalongan	2 dokumen	2.580.000	APBD		2 dokumen	2.500.000
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Pekalongan	95 laporan	140.409.000	APBD		95 laporan	70.075.000
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	100 Persen	557.271.000	APBD		100 Persen	554.735.000
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Pekalongan	4 laporan	1.760.000	APBD		4 laporan	2.400.000



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Pekalongan	12 laporan	264.628.000	APBD		12 laporan	263.000.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor	Kota Pekalongan	12 laporan	290.883.000	APBD		12 laporan	289.335.000
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pekalongan	100 Persen	3.748.213.000	APBD		100 Persen	2.192.597.000
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kerndaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pekalongan	20 Unit	145.110.000	APBD		20 Unit	162.982.000
2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Kota Pekalongan	47 Unit	3.307.093.000	APBD		47 Unit	1.899.315.000
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Pekalongan	1 unit	277.760.000	APBD		1 unit	105.300.000
2.11.01.2.09.0010,	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Pekalongan	43 Unit	18.250.000	APBD		43 Unit	25.000.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase limbah yang diolah	Kota Pekalongan	45,97 persen	1.136.972.000	APBD		45,97 persen	3.491.106.000
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	Kota Pekalongan	54,38 persen	736.064.000	APBD		54,38 persen	848.604.000
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah dokumen Uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Kota Pekalongan	1 dokumen	516.134.000	APBD		1 dokumen	570.018.000
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	1 dokumen	18.250.000	APBD		1 dokumen	25.000.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kota Pekalongan	200 dokumen	201.680.000	APBD		200 dokumen	253.586.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	Kota Pekalongan	76.47 persen	400.908.000	APBD		76.47 persen	2.642.502.000
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten / Kota yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	2 laporan	48.180.000	APBD		2 laporan	66.000.000
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	Kota Pekalongan	5 titik	352.728.000	APBD		5 titik	2.576.502.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Kota Pekalongan	2,939 persen	4.794.592.000	APBD		2,939 persen	4.191.994.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik	Kota Pekalongan	109,981 Ha	4.794.592.000	APBD		109,981 Ha	4.191.994.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Pekalongan	108,53 Ha	4.033.632.000	APBD		108,53 Ha	3.929.494.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pekalongan	34,1 Unit	760.960.000	APBD		34,1 Unit	262.500.000
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	Kota Pekalongan	13,33 persen	1.640.000	APBD		13,33 persen	2.273.000
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Kota Pekalongan	6 persen	1.640.000	APBD		6 persen	2.273.000
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	Kota Pekalongan	1 Laporan	1.640.000	APBD		1 Laporan	2.273.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	Kota Pekalongan	16,67 persen	29.590.000	APBD		16,67 persen	41.728.000



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	Kota Pekalongan	10 kegiatan	29.590.000	APBD		10 kegiatan	41.728.000
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Kota Pekalongan	1 dokumen	11.230.000	APBD		1 dokumen	23.368.000
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Pekalongan	67 badan usaha	18.360.000	APBD		67 badan usaha	18.360.000
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	50,00 persen	352.500.000	APBD		50,00 persen	322.836.000
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	Kota Pekalongan	5 komunitas	352.500.000	APBD		5 komunitas	322.836.000



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN
RENCANA KERJA TAHUN 2026



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Kota Pekalongan	1 Dokumen	52.500.000	APBD		1 Dokumen	90.000.000
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Pekalongan	700 orang	161.415.000	APBD		700 orang	232.836.000
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan formal/Lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah Lembaga Pendidikan formal/Lembaga Masyarakat/komunitas/kelompok Masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Pekalongan	5 Lembaga	138.585.000	APBD		5 Lembaga	0
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	Kota Pekalongan	75 persen	44.350.000	APBD		75 persen	86.386.000
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	Kota Pekalongan	3 penghargaan	44.350.000	APBD		3 penghargaan	86.386.000
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Pekalongan	4 Entitas	44.350.000	APBD		4 Entitas	86.386.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	Kota Pekalongan	100 persen	10.630.000	APBD		100 persen	9.310.000
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	Kota Pekalongan	6 kasus	10.630.000	APBD		6 kasus	9.310.000
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tingkat Kab/Kota	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tingkat Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kota Pekalongan	18 pengaduan	9.310.000	APBD		18 pengaduan	9.310.000
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penganggujawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	Kota Pekalongan	1 perkara	1.320.000	APBD		1 perkara	0
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	Kota Pekalongan	0,3 persen	19.943.406.000	APBD		0,3 persen	14.372.095.000
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	Kota Pekalongan	17,94 persen	19.943.406.000	APBD		17,94 persen	14.372.095.000



Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif (Rp.)
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat dan Kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Kota Pekalongan	35 kelompok	727.970.000	APBD		35 kelompok	427.734.000
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Pihak Lain di luar Kabupaten/Kota untuk pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Persampahan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Kota Pekalongan	1 dokumen	10.641.277.000	APBD		1 dokumen	7.170.000.000
2.11.11.2.01.0020	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	Kota Pekalongan	56.324.807 ton	8.574.159.000	APBD		56.324.807 ton	6.774.361.000



3.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan program dan kegiatan juga menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat langsung maupun dari para relawan peduli lingkungan Kota Pekalongan yang langsung ditujukan kepada Perangkat daerah dan juga hasil tinjauan kelapangan.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis perangkat daerah

Pada Musrenbang Kota tahun 2025, usulan dari pemangku kepentingan, baik dari SKPD terkait, kelompok masyarakat langsung maupun dari para relawan peduli lingkungan Kota Pekalongan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup disajikan dalam tabel 3.3 dibawah.

Tabel 3. 3 Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Dinas Lingkungan Hidup

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Program Pengelolaan Sampah				
1.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah				
1.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Kelurahan Sapurokeb ulen	Pengadaan kendaraan viar angkut sampah 1 unit Rp 50.000.000,-	1 unit	
		RW 05 Panjang baru Kota Pekalongan	Hibah budidaya magot 1 lokasi Rp 100.000.000,-	1 lokasi	
1.1.2	Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	DLH Kota Pekalongan	Peningkatan Kualitas Kebersihan Lingkungan Rp 30.000.000,-	1 paket	
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)				



No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Besaran/Volume	Catatan
2.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Pembangunan taman dan tempat bermain anak Rp 100.000.000,-		
2.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Perum Limas RT 01 RW 13 Kelurahan Krapyak			



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2026.

Perumusan rencana program dan kegiatan DLH Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kota Pekalongan yang tertuang dalam RPJMD. Program, kegiatan dan sub kegiatan DLH Kota Pekalongan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kota Pekalongan adalah:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan DLH Kota Pekalongan Tahun 2026

No	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Indikatif	Indikator kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	40.635.550.000		
	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	40.635.550.000		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.321.870.000	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.470.000	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.480.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.640.000	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan lapiran hasil	2 dokumen



			koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.350.000	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.603.463.000	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.497.763.000	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	105 orang/bulan
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.180.000	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dokumen
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.520.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.330.000	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	12.330.000	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	373.123.000	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.026.000	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.678.000	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	730.000	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.700.000	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket



4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.580.000	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.409.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	95 laporan
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	557.271.000	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.760.000	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	264.628.000	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	290.883.000	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.748.213.000	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	145.110.000	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 unit
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	3.307.093.000	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	57 unit
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	277.760.000	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit



6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.250.000	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	43 unit
II	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	0	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	20 persen
7	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	0	Jumlah penyusunan dokumen KLHS untuk perencanaan	1 dokumen
7.1	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	0	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang disusun	2 dokumen
III	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.136.972.000	Persentase limbah yang diolah	45,97 persen
8	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	736.064.000	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	54,38 persen
8.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	516.134.000	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1 dokumen
8.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	18.250.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen
8.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	201.680.000	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	200 dokumen
9	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	400.908.000	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	76,47 persen
9.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	48.180.000	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau	3 laporan



	Lingkungan Hidup pada Masyarakat		kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kab/kota yang dilaksanakan	
9.2	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	352.728.000	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	73 titik
IV	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	4.794.592.000	Persentase ruang terbuka hijau	2,939 persen
10	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.794.592.000	Luas RTH Publik	109,981 Ha
10.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.033.632.000	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	109 Ha
10.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	760.960.000	Unit Taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota	34,1 unit
V	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1.640.000	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen
11	Penyimpanan Sementara Limbah B3	1.640.000	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	6 persen
11.1	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	1.640.000	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 laporan
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	29.590.000	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen



12	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	29.590.000	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	10 kegiatan
12.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	11.230.000	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	1 dokumen
12.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18.360.000	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	67 badan usaha
VII	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	352.500.000	Persentase masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi lingkungan hidup	50 persen
13	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	352.500.000	Jumlah masyarakat/komunitas peduli LH yang mendapat edukasi lingkungan hidup	5 komunitas
13.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	52.500.000	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen
13.2	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	161.415.000	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	700 orang



13.3	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	138.585.000	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	5 lembaga
VIII	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	44.350.000		
14	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.350.000	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	3 penghargaan
14.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	44.350.000	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	4 entitas
IX	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	10.630.000	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen
15	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.630.000	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6 kasus
15.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	9.310.000	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti/ditangani	18 pengaduan
15.2	Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1.320.000	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kab/kota	1 perkara



X	Program Pengelolaan Persampahan	19.943.406.000	Persentase pengelolaan sampah	0,3 persen
16	Pengelolaan Sampah	19.943.406.000	Persentase pengurangan sampah	17,94 persen
16.1	Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	8.574.159.000	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kab/Kota atau TPA/TPST Regional	56.324.807 ton
16.2	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	727.970.000	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	35 kelompok
16.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	10.641.277.000	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kab/kota untuk pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada	1 dokumen
		40.635.550.000		

Dalam Renja DLH Kota Pekalongan Tahun 2026 terdapat 9 Program, 15 Kegiatan dan 40 sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Total anggaran Renja 2026 sebesar Rp. 40.635.550.000,-. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan DLH Kota Pekalongan yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Indikator kinerja dari program-program tersebut menjadi tanggung jawab DLH Kota Pekalongan dalam evaluasi RKPD dan LKPJ.



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pekalongan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan selama satu tahun kedepan. Renja disusun mengacu pada visi misi Walikota Pekalongan dan berpedoman kepada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) DLH Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025.

5.1 Catatan Penting

Terbatasnya alokasi anggaran serta proses penganggaran dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin harus mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan peningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DLH Kota Pekalongan tahun 2026, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Substansi Renja DLH Kota Pekalongan disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Pekalongan tahun 2025 dan Renstra DLH Kota Pekalongan tahun 2025-2029.
- b. DLH Kota Pekalongan berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pekalongan Tahun 2026 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026.



- c. DLH Kota Pekalongan berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 yang berpedoman kepada Renja DLH Kota Pekalongan Tahun 2026 dan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2026 dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DLH Kota Pekalongan Tahun 2026, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (RENJA) DLH Kota Pekalongan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja DLH. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf DLH Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Untuk dapat merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DLH Kota Pekalongan Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Apabila terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja yang telah direncanakan, baik diakibatkan oleh anggaran yang kurang memadai ataupun permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Semoga Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, serta memberikan manfaat bagi



proses perencanaan pembangunan Kota Pekalongan sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kota Pekalongan.

Pekalongan, 18 Juli 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEKALONGAN



Dr. SRI BUDI SANTOSO, M.Si

Penyelia Utama Muda

NIP. 19701214 199003 1 004



LAMPIRAN

